



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga untuk tertib administrasi Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahap II.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHAP II.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 05 Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK.II Maros Tahun 1977 Nomor 3 Seri D Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 06 Tahun 1984 tentang Memperlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 07 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Benur, Nener dan Bibit Ikan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros Tahun 1996 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 09 Tahun 1998 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros Tahun 1999 Nomor 18 Seri D Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 13 Seri E Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 61 Seri E Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 13 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 56 Seri E Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 66 Seri C Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2004 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2009 tentang Kehutanan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama Puskesmas di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup

Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2014 tentang Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 3).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 8
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHAP II

I. UMUM

Sejak Tahun 2016 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros sebagai Unit Organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan terus berupaya melakukan penataan Produk Hukum Daerah, salah satunya dengan melakukan analisis dan pemetaan terhadap Produk Hukum Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2017 dibentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros yang mencabut sebanyak 55 (lima puluh lima) Peraturan Daerah Kabupaten Maros, sebagai tindak lanjut dari hasil Analisis dan Pemetaan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2019 dan 2020 kembali dilakukan analisis dan pemetaan terhadap Peraturan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Kajian Produk Hukum Daerah. Dari hasil kegiatan tersebut, terhimpun sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Daerah yang perlu dicabut. 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Daerah tersebut merupakan Peraturan Daerah yang tidak lagi dibutuhkan substansinya atau materi muatannya telah diatur dalam Produk Hukum terbaru sehingga pencabutannya tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengamanatkan adanya Deregulasi Kebijakan sehingga dipandang perlu mengeliminasi Peraturan Daerah yang tidak lagi efektif serta bersifat menghambat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 05 Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Angka 2

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 06 Tahun 1984 tentang Memperlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan substansinya tidak lagi dibutuhkan.

Angka 3

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 07 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Benur, Nener dan Bibit Ikan Lainnya, perlu dicabut karena Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Benur, Nener dan Bibit Ikan Lainnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 4

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 09 Tahun 1998 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, Perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Angka 5

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan, perlu dicabut karena Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendelegasikan Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014). Adapun teknis pelaksanaan penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan jalan oleh Dinas Perhubungan cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 6

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah, perlu dicabut karena Substansi Materinya telah diatur dengan Peraturan Daerah terbaru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Angka 7

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Daerah, perlu dicabut karena materi muatannya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Angka 8

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata, perlu dicabut karena substansi materinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Angka 9

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 10

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan, Perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adapun substansi materinya cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 11

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, perlu dicabut karena bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 12

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Perlu dicabut karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah mengatur secara rinci pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan tidak mendelegasikan

pembentukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. adapun teknis pelaksanaannya cukup diatur dengan Peraturan Bupati apabila diperlukan.

Angka 13

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Maros, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Angka 14

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan substansinya tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Angka 15

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang telah mengatur secara rinci mengenai penataan kelurahan dan tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Angka 16

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi materinya cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 17

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan

Peraturan Desa, perlu dicabut karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mendelegasikan Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Angka 18

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, Perlu dicabut karena Dasar Pembentukannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun substansi materinya cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 19

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan, perlu dicabut karena Dasar Pembentukannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Angka 20

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, perlu dicabut karena Dasar Pembentukannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan telah dicabut serta tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Angka 21

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa, Perlu dicabut karena Dasar Pembentukannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang telah mengatur secara rinci mengenai Tata Cara Kerja Sama Desa dan tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Adapun pengaturan teknisnya cukup dengan Peraturan Bupati.

Angka 22

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2009

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa, Perlu dicabut karena Dasar Pembentukannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Angka 23

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2009 tentang Kehutanan Masyarakat, perlu dicabut karena bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 24

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Angka 25

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama Puskesmas di Kabupaten Maros, Perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Angka 26

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup Kabupaten Maros, Perlu dicabut karena Satuan pendidikan dibentuk sebagai UPTD, untuk SMA dan SMK bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten serta tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Angka 27

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2014 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, perlu dicabut karena bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 28

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove, perlu dicabut karena bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 8.....